

IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP DI KOPERASI CIPTA SEJAHTERA TAHUN 2023

David Fernando
Medinal
Yunita Maharani

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract : *Implementation of discrepancies presentation of financial reports based on the research facility at prosperous cooperation in 2023. Under the management guidance of the i was given by Mr. Medinal and the second counselor is Ms. Yunita Maharani. The cooperative's financial report may be said to be based on a sheet, accounting for effort/profit, equity change statements, cash flow statements, and record of financial statement. The study aims to know and analyze how the checkmate applies to creating financial report on prosperous cooperatives. The study is qualitative research with a descriptive approach aimed at illustrating circumstances based on visible facts using interview techniques, documentation and library studies. Research award shows up to this day the trademark welfare cooperative financial report is still up to the balance, profit counting reports, equity change statements, cash flow statements. In addition, the financial statements presented are not yet consistent with the historical case.*

Keywords : *Accounting, Profit and Loss, Equity Change, Cash Flow, Historical Consistency*

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, perekonomian Indonesia menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Ada tiga badan usaha yang diidentifikasi di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Koperasi. Pemerintah saat ini mendorong koperasi yang dinilai merupakan langkah signifikan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Perekonomian Indonesia diselenggarakan secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan," yang sejalan dengan misi kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan bukan kemakmuran pribadi dihargai di atas segalanya. Dalam hal ini koperasi sejalan dengan pasal tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi harus dilihat sebagai kelompok yang mampu bersatu dan memberikan pengaruh ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari orang-orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatan usahanya pada asas-asas perkoperasian, seperti gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yaitu asas kekeluargaan dan keanggotaan yang sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil berdasarkan jasa usaha masing-masing anggota, dan kompensasi modal yang terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, macam-macam koperasi yang ada saat ini ditentukan oleh seberapa sebanding kepentingan dan kegiatan para anggotanya. Tergantung pada jenis usahanya, Indonesia menawarkan empat jenis koperasi: koperasi multi-perusahaan, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah kelompok yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggotanya, seperti pangan, papan, dan pakaian. Koperasi produksi adalah koperasi yang memproduksi barang-barang dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi. Anggota koperasi produksi biasanya memiliki usaha sendiri, dan mereka juga mendapat dukungan keuangan dan pemasaran dari koperasi. Koperasi yang membantu anggotanya menyimpan uang dan meminjamkan uang satu sama lain dikenal sebagai koperasi simpan pinjam. Secara umum simpanan atau pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi lain memberikan pinjaman dana yang diterima anggota koperasi. Koperasi multibisnis adalah koperasi yang beroperasi di berbagai industri, termasuk manufaktur, melayani kebutuhan sehari-hari, dan membantu perusahaan simpan pinjam.

Salah satu jenis sektor usaha yang berfungsi dalam perekonomian adalah sektor koperasi. Koperasi beroperasi secara berbeda dari domain bisnis lain dalam cara mereka melakukannya. Perbedaan ini dapat ditemukan dalam peran yang dimainkan oleh koperasi, yang mencakup peran sosial dan ekonomi. Koperasi berbeda dari bentuk korporasi lainnya karena keanggotaan di dalamnya sepenuhnya bersifat opsional dan terbuka, tanpa tekanan untuk bergabung. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), para anggota koperasi mengambil keputusan akhir.

Menjunjung tinggi kepercayaan anggota terhadap operasional koperasi dan merangsang minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Minat dan kepercayaan masyarakat harus dapat ditingkatkan melalui koperasi. Koperasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat antara lain dengan menerbitkan laporan keuangan. Agar suatu koperasi dapat berkembang dan mencapai tujuannya, maka harus menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mengatur pengelolaan koperasi. Ini berarti suatu koperasi harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mengatur pengelolaan koperasi agar dapat berkembang dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini diperlukan karena pengurus koperasi mempunyai tuntutan untuk memajukan koperasi melalui operasionalnya.

Laporan keuangan koperasi termasuk dalam laporan pertanggungjawaban pengurus untuk satu periode akuntansi, sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja pengelolaan koperasi. Salah satu aspek tanggung jawab manajemen adalah keuangan koperasi. Laporan yang diperuntukkan bagi pihak internal maupun eksternal ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengevaluasi hasil kinerja pengurus koperasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarwanto (2013) dalam Sastrawati (2015), pentingnya laporan keuangan bagi koperasi terletak pada kemampuannya (1) menyediakan data keuangan yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal suatu koperasi, dan (2) menyediakan data yang dapat diandalkan tentang fluktuasi sumber daya. Untuk mengetahui sisa hasil usaha koperasi, perlu dilakukan: (1) menilai potensi koperasi dan menghasilkan hasil usaha di masa depan; (2) membantu pengguna informasi keuangan dalam melakukan hal tersebut; dan (3) mengungkapkan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan terkait, seperti rincian kebijakan akuntansi koperasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang Akuntansi Koperasi merupakan standar unik laporan keuangan koperasi yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Namun demikian, Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) Nomor 8 telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Oktober 2010. Dampak konvergensi IFRS yang memaksa pencabutan SAK berbasis industri karena Sempat diatur oleh SAK lain, menjadi dasar pencabutan PSAK 27. PPSAK 8 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, setelah disahkan pada tanggal 8 April 2011.

Setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik wajib mengacu pada laporan keuangannya dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang "Pedoman Umum Akuntansi Perkoperasian" pasal 3. Sesuai dengan surat edaran tersebut, koperasi harus mendorong transparansi pelaporan dengan menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi lembaga keuangan yang tidak bertanggung jawab kepada publik (SAK ETAP).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan oleh pelaku usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak mempunyai jumlah signifikan akuntabilitas publik, termasuk koperasi. Tidak ada referensi mengenai SAK umum dalam SAK ETAP yang merupakan standar akuntansi independen. Segala kegiatan koperasi diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkini yang dikeluarkan oleh menteri terkait, dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Perkoperasian. Akuntansi yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2015. SAK ETAP merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap UMKM dan koperasi di Indonesia.

Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, yang juga menampilkan: (i) seluruh perubahan ekuitas atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kedudukannya sebagai pemilik, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan signifikan, dan informasi penjelasan lainnya semuanya dianggap sebagai laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP. Suatu entitas harus menyediakan setidaknya dua periode dari setiap laporan keuangan yang diperlukan, termasuk komentar terhadap laporan keuangan yang relevan, untuk menyampaikan laporan keuangan yang lengkap. (IAI, 2013).

Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk Entitas Kecil dan Menengah (IFRS untuk UKM) mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam mengajukan kredit berupa laporan keuangan, penilaian kinerja, mengetahui posisi keuangan, perhitungan pajak, dan manfaat lainnya. Selain itu, SAK ETAP juga dapat membantu manajemen menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan. Dalam berbagai kasus, SAK ETAP memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi bisnis.

Diharapkan dengan adanya SAK ETAP akan menjawab kesulitan para pelaku koperasi dan UKM dalam menyusun laporan keuangan agar menjadi suatu pelaporan keuangan yang efektif namun juga tidak serumit SAK Umum, sehingga mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi ke depannya.

Koperasi yang diharapkan dapat menjadi tonggak utama perekonomian Indonesia mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya misalnya kekurangan dana untuk operasional koperasi. Kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi, selain itu rendahnya pendidikan serta kurangnya pengalaman dalam bidang akuntansi menjadi kendala yang harus dihadapi oleh koperasi.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat terdapat 708 koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tersebut diambil dari 1.116 koperasi yang tercatat dalam sistem ODS per Desember 2021. Dari 1.116 koperasi yang ada di Babel, sebanyak 63,44% koperasi aktif. Kata Kabid Koperasi Dinas KUKM Babel. (06/06/20220). Dari 708 Koperasi aktif,

sebanyak 298 koperasi di Babel telah melaksanakan (RAT) Rapat Anggota Tahunan. Ia menjelaskan bahwa koperasi harus menggelar RAT setiap tahun buku. Karna RAT ini menandakan bahwa koperasi tersebut aktif.

RAT merupakan Laporan Keuangan dalam bentuk tahunan yang disediakan koperasi untuk laporan ke Inkopdit. Disini laporan RAT masih belum sesuai dengan SAK ETAP karena yaitu terdapat kurangnya pemahaman pengurus koperasi yang belum memiliki pemahaman memadai tentang konsep dan aturan dalam SAK ETAP dan kurangnya pelatihan atau sosialisasi mengenai SAK ETAP bagi pengurus koperasi dan koperasi sering kekurangan staf yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang akuntansi dan sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga akuntansi yang handal di lingkungan koperasi.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dimengerti bahwa kurangnya pemahaman koperasi (Pengurus atau Karyawan) terhadap Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal inilah yang harus dilakukan oleh koperasi di Indonesia agar dapat mempublikasikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di Laporan RAT.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Dwiyatmoko Pujiwidodo tentang Penerapan SAK ETAP dalam Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan PT dikutip dalam penelitian ini. Desain Fashion di Jakarta. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda karena melihat dari periode pelaporan keuangan yang berbeda dan menggunakan metodologi yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian Dwiyatmoko Pujiwidodo adalah metode *ex post facto*, namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu wawancara atau studi lapangan (*field research*).

Koperasi Cipta Sejahtera harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 mewajibkan untuk koperasi membuat laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Mengingat latar belakang informasi di atas dan pentingnya penyusunan laporan keuangan koperasi, alasan utama penulis mengambil judul ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan koperasi terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dengan judul penelitian: "Implementasi Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Di Koperasi Cipta Sejahtera Tahun 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi koperasi terhadap persyaratan SAK ETAP pada Koperasi Cipta Sejahtera di tahun 2023. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Koperasi Cipta Sejahtera (Karyawan atau Pengurus) tentang menerapkan standar akuntansi yang sesuai untuk koperasi di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016), laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. Informasi ini disusun dan disajikan secara sistematis untuk periode tertentu guna membantu pemakai laporan,

seperti pemilik, manajer investor, dan pihak lainnya, dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP Tahun 2009, tujuan dari Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi para pengguna dalam membuat Keputusan ekonomi informasi ini juga membantu pengguna dalam menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas serta memahami dan memprediksi arus kas di masa depan.

Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperative*, yang dapat disederhanakan sebagai penggabungan kata "co" yang berarti bersama dan "operation" yang berarti bekerja. Dalam konteks ini, koperasi sering diinterpretasikan sebagai kelompok individu yang Bersatu untuk mencapai tujuan Bersama, diorganisir dalam sebuah entitas yang menitikberatkan pada prinsip kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah sebuah usaha yang mengumpulkan simpanan dari anggotanya dan kemudian meminjamkan dana tersebut kepada anggota lain yang membutuhkan dukungan finansial. Fungsi utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan layanan penyimpanan dan peminjaman dana bagi anggotanya.

Landasan Koperasi

Arah, tujuan, fungsi, dan posisi pelaku koperasi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi lainnya semuanya diatur oleh Yayasan Koperasi Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Prinsip-Prinsip Perkoperasian.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi yang diuraikan dalam Pasal 6 UU No 17 Tahun 2012 meliputi:

1. Pelaksanaan Prinsip Koperasi:
 - a) Keikutsertaan dalam koperasi bersifat sukarela.
 - b) Anggota mengawasi satu sama lain dengan cara yang tertib dan demokratis.
 - c) Anggota terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
 - d) Koperasi adalah bisnis yang mandiri dan dikelola sendiri, serta mampu menopang dirinya sendiri.
 - e) Koperasi juga berperan dalam mendidik dan melatih anggotanya, manajer, staf, dan pengawas.
 - f) Dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan lokal, nasional, regional, dan global, koperasi memberikan layanan yang luar biasa kepada anggotanya dan mengembangkan gerakan koperasi.
 - g) Melalui kebijakan yang disetujui oleh anggota, koperasi mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.
2. Fungsi Prinsip-Prinsip Koperasi:
 - a) Prinsip-prinsip yang disebutkan pada bagian pertama berfungsi sebagai sumber motivasi dan memungkinkan organisasi serta operasional usaha koperasi berjalan sesuai dengan tujuan pendirinya.

SAK ETAP

IAI menyatakan dalam SAK ETAP (2016) bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk keperluan pelaporan kepada pengguna eksternal dan memiliki tingkat akuntabilitas publik yang rendah. Pengguna eksternal termasuk Lembaga pemeringkat kredit, kreditur, dan pemilik yang tidak terlihat langsung dalam manajemen bisnis.

Tujuan Penggunaan SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berfungsi sebagai panduan akuntansi yang lebih mudah dipahami untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang besar. Tujuannya mencakup:

1. Penyederhanaan Pelaporan
Mengurangi kerumitan dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik.
2. Kepatuhan
Memastikan bahwa laporan keuangan entitas kecil dan menengah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum.
3. Transparansi dan Konsistensi
Meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, sehingga memudahkan pihak eksternal dalam menilai kinerja keuangan entitas.
4. Pengurangan Biaya
Mengurangi biaya dalam penyusunan laporan keuangan karena standar yang lebih sederhana dan mudah diterapkan.
5. Peningkatan Akses terhadap Kredit
Membantu entitas kecil dan menengah memperoleh akses ke kredit dan investasi dengan menyediakan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Dengan SAK ETAP, entitas kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal tanpa terbebani oleh kompleksitas yang mungkin tidak relevan dengan operasional mereka.

Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2016), laporan keuangan harus secara akurat menyajikan status keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Untuk memastikan kewajaran, efek dari transaksi, peristiwa, dan keadaan lainnya harus dipresentasikan dengan tepat dan sesuai dengan definisi serta standar pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif.

Penerapan SAK ETAP menghasilkan laporan keuangan yang adil mengenai arus kas, kinerja keuangan, dan posisi keuangan entitas, serta pengungkapan tambahan jika diperlukan. Jika kepatuhan terhadap kriteria-kriteria tertentu dalam SAK ETAP tidak cukup untuk memungkinkan pengguna memahami dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas, maka pengungkapan lebih lanjut diperlukan.

Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Laporan keuangan adalah bagian integral dari proses pelaporan keuangan menurut IAI dalam SAK ETAP (2016). Laporan keuangan entitas secara komprehensif diatur dalam SAK ETAP (2016) dengan unsur sebagai berikut :

1. Neraca
Neraca mencerminkan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada titik waktu tertentu, yaitu akhir periode pelaporan, sesuai dengan pedoman IAI dalam SAK ETAP (2016). Komponen-komponen berikut termasuk dalam minimum neraca:
 - a) Kas dan Setara Kas
 - b) Piutang Usaha dan Piutang Lainnya
 - c) Persediaan
 - d) Properti Investasi
 - e) Aset Tetap
 - f) Aset Tidak Berwujud
 - g) Utang Usaha dan Utang Lainnya
 - h) Aset dan Kewajiban Pajak
 - i) Kewajiban diestimasi
 - j) Ekuitas

Laporan laba rugi mencakup semua pendapatan dan biaya yang diakui dalam suatu periode, kecuali diatur lain dalam SAK ETAP menurut IAI (2016). Perubahan dalam praktik akuntansi dan koreksi kesalahan, yang dilaporkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan bukan sebagai komponen laba atau rugi pada periode saat itu, harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan SAK ETAP. Komponen-komponen minimal yang harus dimasukkan dalam Laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan;
- b) Beban Keuangan;
- c) Sebagian keuntungan atau kerugian investasi dengan metode ekuitas;
- d) Beban Pajak;
- e) Laba atau Rugi Neto;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang juga menampilkan komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Laba atau rugi periode tersebut;
- b) Pendapatan dan beban diakui secara langsung di ekuitas;
- c) Dampak perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan yang teridentifikasi sesuai dengan Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan pada setiap komponen ekuitas;
- d) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas;
- e) Laporan Arus Kas, dan

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas suatu entitas di masa lalu, sesuai dengan penjelasan IAI dalam SAK ETAP (2016). Proses ini melibatkan pengelompokan perubahan tersebut berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama periode waktu tertentu. Investasi yang sangat likuid dan dianggap setara kas dipertahankan untuk memenuhi kewajiban kas jangka pendek atau tujuan investasi lainnya. Oleh karena itu, aset sering hanya dianggap setara kas jika jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang setelah tanggal pembelian. Sebuah organisasi menghasilkan laporan arus kas yang membagi

arus kas ke dalam kategori seperti operasional, investasi, dan pendanaan selama periode waktu tertentu.

2. Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2016, IAI mengemukakan bahwa catatan atas laporan keuangan memberikan informasi yang melebihi yang terdapat dalam laporan keuangan itu sendiri. Catatan tersebut mencakup informasi mengenai hal-hal yang tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan keuangan serta penjelasan naratif atau rincian jumlah yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan adalah:

Memberikan penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi tertentu.

Mengungkapkan informasi yang wajib diungkapkan menurut SAK ETAP namun tidak termasuk dalam laporan keuangan.

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan, meskipun informasi tersebut tidak ditampilkan langsung dalam laporan keuangan.

Secara ideal, catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis. Setiap item dalam laporan keuangan memiliki referensi silang dengan informasi relevan yang terdapat dalam catatan laporan keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada wawancara atau studi lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan pengukuran angka dan statistik. Penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif dalam bentuk narasi atau lisan, yang berasal langsung dari orang-orang yang diamati.

Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada penekanan pada pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Cipta Sejahtera. Oleh karena itu, penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati dan mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dari berbagai sumber terkait.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, baik individu maupun lembaga yang menyediakan data untuk keperluan penelitian. Contohnya adalah wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti Laporan Keuangan Koperasi dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta informasi pendukung lainnya yang diperoleh langsung dari sumber data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, tetapi merupakan data yang sudah ada dan digunakan untuk mendukung keperluan penelitian. Contoh data sekunder dalam penelitian ini termasuk buku-buku dan sumber bacaan lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan memeriksa Laporan Keuangan Koperasi Cipta Sejahtera Tahun 2023 untuk mengevaluasi penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan jawaban, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Peneliti memilih teknik wawancara terstruktur (*Structured-Interview*) dengan menyusun pertanyaan tertulis mengenai informasi yang diinginkan. Data yang diperoleh dari wawancara mencakup:

- Bentuk Laporan Keuangan yang diajukan oleh Koperasi Cipta Sejahtera.
- Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi Cipta Sejahtera dengan SAK ETAP.

3. Studi Pustaka

Melibatkan tinjauan literatur terkait standar akuntansi (SAK ETAP), konsep keuangan koperasi, dan metode analisis laporan keuangan. Pendekatan ini membantu peneliti memahami landasan teoritis dan kerangka kerja yang relevan untuk penelitian ini.

Teknik Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasi, memilah-milahnya menjadi bagian yang dapat dikelola, mensintesis, menemukan pola-pola, menemukan hal-hal yang penting serta yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012). Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2012) menjelaskan tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data:

Peneliti mengumpulkan data, memilih pokok-pokok informasi, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk penyajian data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data, biasanya dalam bentuk tabel seperti Neraca, Laporan Laba Rugi/Perhitungan Usaha, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas, untuk memudahkan pemahaman tentang informasi yang terdapat dalam data. Data ini juga dibandingkan dengan ketentuan pemerintah, khususnya Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP. Setelah itu, peneliti merencanakan langkah kerja berikutnya berdasarkan hasil analisis tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi pada tahap ini. Data yang sudah direduksi dan disajikan dengan lengkap digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan oleh peneliti.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Cipta Sejahtera masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam SAK ETAP. Oleh karena itu, Koperasi seharusnya menyusun Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.

Rincian dari setiap unsur yang sudah sesuai atau belum sesuai dengan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Cipta Sejahtera dapat dilihat dalam persentase yang tercantum dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 1 Analisis Persentase Kesesuaian Unsur-Unsur pada Laporan Keuangan Koperasi Cipta Sejahtera Berdasarkan SAK ETAP

No.	Nama Unsur-unsur	Jumlah Unsur Neraca	Sesuai SAK ETAP	Belum Sesuai SAK ETAP
Neraca				
1.	Kas dan Setara Kas	1	1	-
2.	Piutang Usaha dan Piutang Usaha Lainnya	1	1	-
3.	Persediaan	1	0	1
4.	Properti Investasi	1	1	-
5.	Aset Tetap	1	1	-
6.	Aset tidak berwujud	1	0	1
7.	Utang usaha dan utang lainnya	1	1	-
8.	Aset dan kewajiban pajak	1	0	1
9.	Kewajiban diestimasi	1	1	-
10.	Ekuitas	1	1	-
Laporan Laba Rugi				
11.	Pendapatan	1	1	-
12.	Beban Keuangan	1	1	-
13.	Bagian Laba atau Rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas	1	0	1
14.	Beban Pajak	1	1	-

15.	Laba atau Rugi Neto	1	0	1
Laporan Perubahan Ekuitas				
16.	Laba atau Rugi untuk suatu periode	1	1	-
17.	Pendapatan dan Beban	1	1	-
Laporan Arus Kas				
18.	Arus berdasarkan Aktivitas Operasi	1	1	-
19.	Arus berdasarkan Aktivitas Investasi	1	1	- 4
20.	Arus berdasarkan Aktivitas Pendanaan	1	1	-
Catatan atas Laporan Keuangan				
21.	Catatan atas Laporan Keuangan	1	0	1
Jumlah		21	15	6
Persentase		100%	71.43%	28.57%

Sumber : Data diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat bahwa 71.43% dari penerapan SAK ETAP dalam Laporan Keuangan Koperasi Cipta Sejahtera telah sesuai dengan standar tersebut, sedangkan 28.57% belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan menerapkan SAK ETAP dalam Laporan Keuangan, Koperasi dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS, yang memudahkan implementasinya. Laporan Keuangan ini dapat digunakan sebagai dasar opini audit dan untuk memperoleh dana tambahan, seperti pinjaman dari kreditor (Bank). Informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan juga memberikan berbagai ukuran bagi kepentingan pengambilan keputusan manajerial.

Koperasi akan mengalami dampak negatif jika belum menerapkan SAK ETAP dalam Laporan Keuangannya, seperti kehilangan investor dan kreditor. Sebaliknya, manfaat dari menerapkan SAK ETAP dalam Laporan Keuangan Koperasi adalah memudahkan anggota untuk memahami manfaat yang diperoleh dan sumber daya ekonomi yang dimiliki, serta mengetahui kewajiban dan kekayaan bersihnya selama satu periode.

Koperasi yang telah mematuhi SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya diharuskan membuat pernyataan eksplisit dan lengkap tentang kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan tidak boleh mengklaim kepatuhan terhadap SAK ETAP kecuali jika telah memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi mengenai implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Cipta Sejahtera, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman anggota dan pengurus koperasi terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP disebabkan oleh kekurangan dalam pelatihan dan sosialisasi mengenai standar akuntansi tersebut. Hal ini menyebabkan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar, yang berpengaruh terhadap hasil penelitian ini.
2. Koperasi Cipta Sejahtera menyajikan bentuk laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas. Meskipun Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP. Neraca belum mencantumkan akun persediaan dan aset tidak berwujud yang diharuskan. Laporan Laba Rugi belum menyajikan laba atau rugi bersih yang diperlukan oleh SAK ETAP. Sementara Laporan Perubahan Modal sudah memenuhi persyaratan SAK ETAP. Laporan Arus Kas juga sudah memenuhi SAK ETAP dengan mengklasifikasikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
3. Dari segi kesesuaian dengan SAK ETAP, ditemukan bahwa 71.43% penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi Cipta Sejahtera telah sesuai, sedangkan 28.57% belum memenuhi persyaratan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Koperasi Cipta Sejahtera tidak sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama Koperasi Cipta Sejahtera. Berikut adalah saran yang ingin disampaikan oleh peneliti:

1. Koperasi Cipta Sejahtera disarankan untuk menyusun catatan atas laporan keuangan agar memenuhi persyaratan lengkap sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas koperasi baik di mata pihak eksternal maupun internal.
2. Koperasi Cipta Sejahtera disarankan untuk merekrut karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan atau gelar sarjana dalam bidang akuntansi. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai hambatan dalam

DAFTAR PUSTAKA

Adithya, R., Sari, W. A., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya). 6(1), 313–327.

Afkarina, F. N., Probowulan, D., & Maharani, A. (2022). Penerapan Sak Etap Pada Bumdes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 1(5), 1075–1081.

Anggun Sabella, (2016). “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Tirta Sari (Sak Etap Implementation In The Financial Statements On Cooperative Tirta Sari)” jurnal ilmiah mahasiswa 201 .

Atmowardoyo, Haryanto, (2008). “Metode Penelitian Kualitatif” Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Gedung BP 101 Kampus UNM Gunungsari Baru. Jl. A . P . Petta Rani Makassar 90222.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021. Data Koperasi aktif di Bangka Belitung.

Efendi, Ifan. (2021). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jarya Mandiri di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hernawati, Y., & Irawan, D. (2022). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/PER/M.KUKM/IX/2015. 13(12), 38–44.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2016), *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia (2013). “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public” Dewan Standar Akuntansi Keuangan 124 hlm, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”.

Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Yohanes Juan Huvat. (2015). “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Cu (Credit Union) Daya Lestari Di Samarinda” Jurnal 2015.